

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah menyebabkan jutaan orang miskin khususnya di pedesaan terpuruk di bawah garis kemiskinan. Imbas dari keadaan tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK (pengangguran) dan naiknya harga - harga kebutuhan pokok sehingga terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan pada tahun 1998. Hal yang terpenting dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yaitu memberikan keterampilan serta kemudahan dalam akses atas modal yang dibutuhkan. Sebagai upaya serius pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, maka pada tahun 1998 dicanangkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Namun mulai tahun 2007 berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau disingkat menjadi PNPM Mandiri Pedesaan.

PNPM Mandiri Pedesaan dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan dan pembangunan. Dimana kondisi krisis dan proses kemiskinan yang berkepanjangan ini belum ada sistem perlindungan sosial yang efektif. Oleh karena itu dengan adanya program tersebut dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

Sistem yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan adalah mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat. Sehingga seluruh proses kegiatan program tersebut pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu: a) memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan pengambilan keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab; dan b) menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

PNPM Mandiri Perdesaan terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu 1) Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan bahwa prasarana yang dibangun; 2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat dan bantuan manajemen usaha; dan 3) Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Kegiatan ini dikelola oleh suatu lembaga bernama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin khususnya perempuan. Sehingga UPK menjadi

penting dikarenakan: a) dibentuk untuk kepentingan administrasi; b) peningkatan pemberdayaan kelembagaan; c) pengelola dana abadi; d) merupakan kelembagaan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan sebagai media partisipatoris; dan e) untuk kepentingan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM Mandiri mempunyai batasan waktu dan suatu saat akan berakhir dan salah satu kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang akan masih tetap berjalan. Pada paska program, lembaga UPK diharapkan tetap ada dan menjadi lembaga kredit mikro informal yang dapat terus diakses (dimanfaatkan) oleh masyarakat miskin (khususnya perempuan). Kondisi UPK saat ini dan perkembangannya sangat menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu lembaga kredit mikro informal di Indonesia. Hal ini diperlukan agar UPK dapat menjangkau orang miskin dalam jumlah lebih besar lagi. Keberadaan dan aktivitas lembaga UPK saat ini perlu dianalisis apakah ke depan dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang berkembang dan berkelanjutan sehingga dapat terus melayani kredit khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Untuk meningkatkan efektivitas lembaga UPK tersebut dalam mengelola kegiatan kredit mikro, harus dibenahi dulu sistem strategi bisnis yang dijalankan yaitu sentralisasi, pengendalian, dan sistem akuntansi manajemen, sehingga sebagai lembaga yang mengelola kegiatan kredit mikro UPK memiliki fundamental manajemen yang kokoh dan akuntabel.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahan apa saja yang diteliti untuk mendapatkan jawaban. Bagian ini merupakan pernyataan secara rinci yang akan dikaji, untuk bisa menjawab pertanyaan yang lebih umum. Satu permasalahan sering terjadi dari berbagai aspek permasalahan khusus, yang secara keseluruhan dalam satu kesatuan membentuk permasalahan yang umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh sentralisasi terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali
2. Apakah ada pengaruh pengendalian terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali
3. Apakah ada pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah. Keterkaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beragam hal yang dirumuskan sebagai masalah yang diteliti. Dalam paparan tersebut telah dijelaskan berbagai kegiatan dan permasalahan yang dihadapi UPK sebagai organisasi yang berwawasan pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh sentralisasi terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Pemanfaatan penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Namun dalam rumusan manfaat bisa difikirkan adanya dua jenis manfaat yaitu praktis dan teoritis. Lebih jauh lagi sebenarnya adanya tingkatan dimana proses penelitian ini juga melakukan reorientasi, menekankan perhatian dan memperkuat partisipan yaitu kesadaran mengenai realitas agar dapat memberi manfaat yang lebih baik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pengelola kegiatan PNPM Mandiri perdesaan terhadap pelaksanaan kegiatan program khususnya untuk jenis kegiatan kredit mikro di wilayah Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau khasanah pustaka dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain tentang pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai pelaksana program tersebut.